

BAB 3

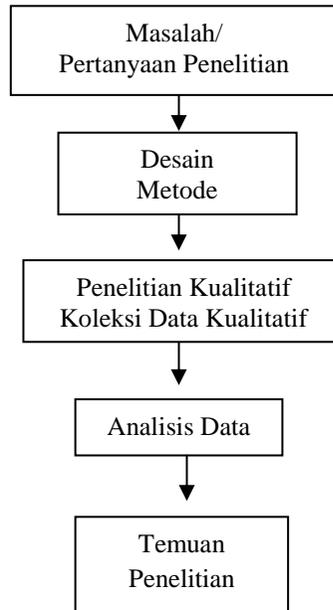
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.

Riset ini memilih jenis penelitian *Qualitative method*, yang berusaha untuk mengeksplorasi 2 variabel independen tersebut di atas. Peneliti mengumpulkan data dari area lapangan di Aceh dengan mewawancarai 57 informan di birokrasi, mantan birokrat, anggota parlemen, akademisi, dan pemimpin partai lokal. Informan dalam penelitian ini dipilih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya, mendalam dan berwibawa. Teknik ini bersifat purposive karena pemilihan informan sepenuhnya diserahkan kepada peneliti berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Dokumen-dokumen terpilih dari sumber-sumber terkait, baik di pemerintah daerah Aceh dan lembaga-lembaga lain, dikumpulkan dan diverifikasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis model interaktif, yang merupakan model analisis yang bertumpu pada 3 komponen; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan pengujian (Miles & Huberman, 1994). Teknik Triangulasi digunakan untuk memeriksa validitas data sebelum dianalisis lebih lanjut. Secara bagan penelitian campuran tersebut terlihat seperti di bawah ini (halaman selanjutnya):

Figur 3.1: Bagan Alur Penelitian Qualitative Method



Pada tahap persiapan penelitian lapangan, dan pengambilan data, maka data kualitatif sedapat mungkin diambil secara simultan, dengan pertimbangan efisiensi waktu dan sumber daya. Tahap selanjutnya dilaksanakan proses pengolahan data dan analisis dengan menggunakan metode kualitatif, untuk menghasilkan temuan penelitian yang lengkap dan sekaligus dapat dilakukan proses triangulasi data.

Variable dependen (Y) yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pemerintah Aceh mempertahankan keputusan politik-paradiplomasi dalam pembentukan Lembaga Wali Nanggroe Tahun 2013.

Yang dimaksud dengan ‘keputusan’ dalam penelitian ini adalah ketetapan yang diambil oleh Parlemen Aceh dan disahkan oleh gubernur dalam Qonun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe, yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang politik-paradiplomasi sebagai kewenangan seorang Wali Nanggroe.

Keputusan ini berupa pasal-pasal yang mencerminkan pokok-pokok politik-paradiplomasi Pemerintahan Aceh.

Dalam penelitian ini, 'Politik-paradiplomasi' didefinisikan dengan mengambil analogi dari definisi Politik-Hukum yang disampaikan oleh Mahfud MD (1999), adalah garis kebijakan resmi pemerintah dalam bidang paradiplomasi yang dilaksanakan dalam bentuk pembuatan atauran maupun praktik paradiplomasi yang berlaku untuk mencapai tujuan negara. Politik-paradiplomasi yang dibahas dalam penelitian ini adalah politik-paradiplomasi Pemerintahan Aceh dan politik-paradiplomasi Pemerintah RI.

Dari pengertian-pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan keputusan politik-paradiplomasi adalah ketetapan yang diambil oleh parlemen Aceh yang berisi garis-garis kebijakan resmi pemerintahan di bidang paradiplomasi yang dilaksanakan dalam bentuk pembuatan atauran maupun praktik paradiplomasi untuk mencapai tujuan Pemerintahan Aceh.

Sementara itu, Variabel independen yang digunakan dalam riset ini ada 2 (X1 dan X2), yakni Ideologi GAM dan Norma paradiplomasi (paradiplomatic Norm) dalam pergaulan antar bangsa. Ideologi GAM adalah keyakinan dan cita-cita GAM sebagaimana diajarkan oleh Hasan Tiro untuk menjadikan Bangsa Aceh yang mandiri atau 'self government' (Gani, 2017), di dalam pemerintahan Aceh pasca perjanjian damai. Secara operasional, variable ini dapat dikenali melalui wacana dan gagasan para aktifis GAM di dalam pemerintahan Aceh baik di eksekutif maupun parlemen, sikap resmi partai lokal yang dibawa ke parlemen, dan tema-tema kampanye partai lokal, dan wacana yang berkembang dalam institusi sayap partai lokal.

Berdasarkan teori preferensi Epstein, Cooper dan Segal yang telah diuraikan sebelumnya, maka bekerjanya ideologi GAM (X1) dalam mempengaruhi 'keputusan politik' (Y) adalah bersifat tidak langsung karena pengaruh ideologi tersebut terlebih dahulu bekerja mempengaruhi 'rationalitas politik' dari para elit dalam pemerintahan

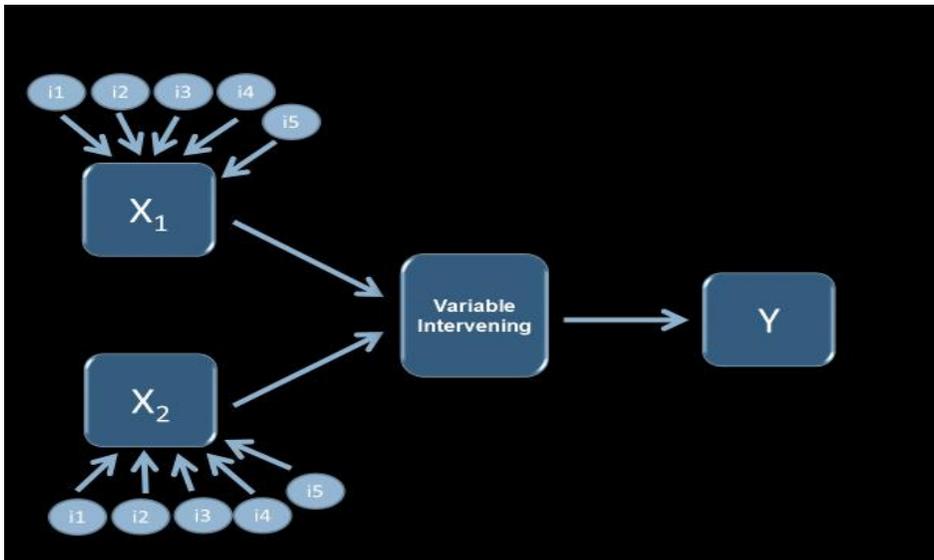
Aceh, baru kemudian mempengaruhi ‘keputusan politik’ (Y) sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Oleh karena, maka diantara variabel independen ‘kontinuitas ideologi’ dan variabel dependen ‘keputusan politik mempertahankan politik paradiplomasi’ terdapat variabel *intervening/mediating* yang berupa ‘rasionalitas politik’.

Dari penegasan Wendt sebelumnya mengenai ‘*International Norm*’, maka peneliti ingin menempatkan ‘norma paradiplomasi’ dari Substate yakni Pemerintahan Aceh sebagai Variable independen (X2). Paradiplomasi sebagai international Norm ini merujuk pada pendapat Noe Cornago yang menegaskan bahwa paradiplomasi telah menjadi norma dalam hubungan internasional yang berbasis pada ‘international custom’ (Cornago, 2006). Secara operasional, norma internasional ini adalah hukum kebiasaan internasional (*customary law*) dan kebutuhan paradiplomatic antar bangsa.

Berdasarkan teori Epstein, maka hubungan antara ‘paradiplomatic norm’ (X2) dengan ‘decision’ (Y) atau keputusan politik terjadi secara tidak langsung, yakni melalui hubungan dengan ‘Intervening/Mediating Variable’ yang berupa ‘Rasionalitas Politik’. ‘*Intervening Variable*’ adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Variabel ini merupakan variabel penyela (atau variabel-antara) antara variabel independen dengan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Variabel *intervening/mediator* dipengaruhi ‘independent Variable’ dan mempengaruhi ‘dependent variable’. (Sugiyono, 2007).

Dengan paparan tersebut, maka design penelitian yang direncanakan adalah berikut :

Figure 3.2: Design Penelitian Kualitative dalam riset ini



Variabel Ideologi GAM ini diindikasikan dengan beberapa indikator (i), yakni keberadaan struktur GAM di Aceh, Komposisi anggota GAM dalam DPR Aceh, Eksistensi anggota GAM dalam Partai Lokal, Pengaruh GAM dalam birokrasi Pemerintahan Aceh, sikap kelompok kepentingan (ulama dan LSM local) terhadap Qanun Wali Nanggroe, dan kegigihan mempertahankan simbol GAM (Bendera).

Dari skema di atas, maka variable norma paradiplomasi dalam penelitian ini diindikasikan dengan beberapa indikator (i), yakni (1) Pengakuan ilmuan bahwa Paradiplomasi sebagai Norma Internasional berbasis '*International Custom*, (2) Diplomasi sebagai Kebiasaan Internasional Bangsa Aceh, (3) Pemimpin Aceh adalah Para Pelaku Diplomatik (Diplomat), (4) Dukungan INGO dan IGO bagi Perjuangan GAM, dan (5) Eksistensi GAM di Luar Negeri Pasca MOU Helsinki.

3.2 Strategi Penelitian

Strategi penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah studi kasus, sebagaimana dinyatakan oleh Robert E. Stake, bahwa metode ini berupaya untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan mengkompilasikan makna-makna kompleks ke dalam sebuah laporan yang solid dan komprehensif yang bersifat naratif-deskriptif, sehingga seolah-olah pembaca merasa mengalaminya sendiri, dan kemudian mereka dapat mengkonstruksikan sebuah kesimpulan (Denzin dan Lincoln; 2000). Studi kasus ini sebagai *'a case of'* sebagaimana diindikasikan oleh Andrew Schrank (Perecman dan Curran; 2006), adalah sangat cocok diterapkan pada penelitian ini karena sebagai bagian dari studi hubungan internasional, karakteristik dari pertanyaan utama dalam riset ini mengacu pada kelompok sosial tertentu, yakni Pemerintahan Aceh yang diwarnai dengan ke-khasan nilai-nilai religius tertentu dalam melaksanakan urusan pemerintahannya. Demikian pula dikatakan oleh Noeng Muhajir, bahwa penelitian tentang studi kasus merupakan usaha untuk menemukan kebenaran ilmiah secara mendalam dan dalam waktu yang cukup lama dari suatu obyek yang bersifat spesifik (Noeng Muhajir; 1996). Peneliti memilih strategi ini karena berusaha menemukan penjelasan yang khas atas pertanyaan yang dikembangkan dalam penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Wawancara mendalam (*in depth interview*)

Wawancara mendalam merupakan suatu teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara tatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Pewawancara tidak memiliki kontrol atas respon yang diberikan oleh informan, artinya informan bebas memberikan jawabannya

(Kriyantono; 2007). Wawancara ini memiliki fungsi deskriptif dan eksploratif, yakni menjadi sumber yang dapat memberikan gambaran atas suatu gejala sosial secara jelas dari semua aspeknya, serta mampu mengungkapkan hal-hal yang tersirat dari makna-makna hubungan diantara objek penelitian, yang masih samar-samar bagi peneliti karena belum pernah diriset secara mendalam sebelumnya (Nasution; 1995). Peneliti mengidentifikasi sejumlah informan yang memiliki informasi mendalam (*rich informants*) untuk memperoleh data penelitian secara akurat dan memadahi.

3.3.2 Dokumen dan Studi Kepustakaan

Telaah atas dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang relatif efektif untuk melacak perjalanan pemikiran dan proses sosial dari sumber tertulis. Penelusuran sumber dokumen ini meliputi dokumen yang dihasilkan oleh Pemerintahan Aceh, seperti perjanjian dengan pihak asing dan laporan tahunan pemerintahan, maupun catatan para *stake holders* seperti tulisan para ulama Aceh tentang penafsiran nilai-nilai dalam pemerintahan, serta buku dan artikel yang dihasilkan oleh para peneliti lain dan para akademisi dari berbagai bidang.

3.3.3 Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pengelolaan kewenangan di bidang paradiplomasi di Pemerintahan Aceh. Kegiatan yang diobservasi ini antara lain meliputi proses perumusan kegiatan paradiplomasi, kegiatan yang dilakukan bersama antara Pemerintahan Aceh dengan pihak asing, keterlibatan *stake holders* lain di luar aparat pemda dalam pengelolaan paradiplomasi.

Observasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi atau keterangan langsung di lapangan yang sulit diperoleh

apabila hanya dilakukan wawancara saja dengan sejumlah informan (Nasution; 1995).

3.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini diseleksi menurut kriteria yang ditetapkan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang terpercaya/valid, mendalam dan otoritatif. Teknik ini bersifat purposif di mana pemilihan informan sepenuhnya diserahkan kepada peneliti berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan maksud penelitian.

Dalam penelitian ini, kriteria informan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan politik-paradiplomasi dalam qonun tentang pembentukan Lembaga Wali Nanggroe, baik di Parlemen (DPRA) maupun di pemerintahan daerah.
2. Berpengalaman di bidang pemerintahan yang terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan politik-paradiplomasi dalam qonun, seperti mantan pejabat eksekutif ataupun legislatif.
3. Orang di luar pemerintahan yang berpengalaman sebagai pelaku atau yang membantu atau pun yang terlibat dalam pengambilan keputusan, seperti pimpinan partai politik, terutama partai lokal yang dominan, aktifis sayap partai lokal dan aktivis LSM yang mendukung aspirasi partai lokal, dan akademisi yang dilibatkan, atau;
4. Pihak-pihak lain yakni aktifis GAM di luar negeri baik individu maupun secara organisasi yang diyakini mengetahui suatu informasi tertentu terkait dengan pengambilan keputusan politik-paradiplomasi.

3.5 Teknik Analisis Data Kualitatif

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang dinamakan '*interactive model of analysis*', yakni model analisis yang berpijak pada 3 komponen; reduksi data, penyajian data, dan penarikan dan pengujian kesimpulan.

Reduksi data dilakukan dengan melalui 3 tahapan, yakni, pertama, tahap '*editing*' atau pengeditan data yang terkumpul, dan pengelompokan data. Tahap kedua, '*coding*' atau pembuatan kode-kode data sesuai dengan kelompoknya, dan pembuatan 'memo' catatan-catatan yang diperlukan sehingga peneliti dapat mengetahui kelompok-kelompok data dengan jelas sesuai dengan kategorisasi yang dibuat. Tahap ketiga, penyusunan rancangan konsep (konseptualisasi) atas kelompok-kelompok data beserta penjelasan-penjelasanannya, termasuk trend dan pola data yang ada.

Penyajian data melibatkan langkah-langkah pengorganisasian data, yakni menjalin kategori data yang satu dengan kelompok kategori data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan analisis sehingga memungkinkan untuk dibuat kesimpulan sesuai dengan kerangka teori yang buat oleh peneliti secara komprehensif.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip induktif dalam studi kasus ini, yakni dengan mempertimbangkan dengan seksama pola-pola data dan kecenderungan dari pemaparan data yang telah dilakukan. Sebelum sampai pada kesimpulan akhir, peneliti harus melakukan proses peyakinan validitas dengan melakukan konfirmasi ulang yang diperlukan, atau bahkan menyempurnakan kesimpulan-kesimpulan awal, sehingga akhirnya dapat membuat proposisi-proposisi ilmiah mengenai realitas gejala yang diteliti secara sah dan final.

3.6 Uji Validitas Data

Teknik Triangulasi digunakan untuk mengecek ulang validitas data sebelum dianalisis lebih jauh. Triangulasi berarti mengecek ulang data yang diperoleh dengan cara membandingkan kekonsistenan informasi baik dari dimensi waktu, cross-check silang sumber informasi, perbandingan situasional di ruang terbuka dan informasi secara pribadi, atau pun membandingkan sumber resmi dengan sumber tidak resmi. Dapat pula membandingkan informasi pada saat wawancara dengan informasi yang berasal dari dokumen tertulis. Dengan cara ini, maka kesahihan data dapat diperoleh secara *credible* untuk kepentingan analisis penelitian ini.